

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latarbelakang**

Membuka kembali karya – karya sejarah konvensional dapatlah dikatakan bahwa sejarah adalah identik dengan politik alasannya karena melalui karya – karya seperti itu lebih banyak di peroleh pengetahuan tentang jalannya sejarah yang di tentukan oleh kejadian politik, perang, diplomasi dan tindakan tokoh – tokoh politik. Dalam proses politik biasanya masalah kepemimpinan di pandang sebagai faktor tertentu dan senantiasa menjadi tolak ukur. Untuk ini penting diketahui klasifikasi kepemimpinan yang secara umum telah di bedakan oleh Max Weber ke dalam tiga jenis otoritas. Pertama otoritas kharismatik, yaitu berdasarkan pengaruh dan kewibawaan pribadi. Kedua, otoritas tradisional, yang dimiliki berdasarkan pewarisan. Ketiga, otoritas legal–rasional, yaitu dimiliki berdasarkan jabatan serta kemampuan.<sup>1</sup>

Ajaran agama menjadi landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama juga dijadikan sebagai sumber nilai konstitusi, maka sesuai dengan sila pertama di sebutkan yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga juga di sebutkan bahwa “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

---

<sup>1</sup> Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal. 18 – 19

Dasar kehidupan beragama telah disebutkan dalam pembukaan UUD 45. Selanjutnya pengembangan Agama telah di atur dalam UU, serta peraturan pemerintah.<sup>2</sup>

Pada tanggal 12 Maret 1946 Kementrian Agama terbentuk yang di pimpin oleh H.M. Rasyidi, semenjak itu urusan yang berkaitan dengan agama ditangani oleh departemen ini. sesuai dengan Penetapan Presiden (PENPRES) NO 5/SD tanggal 25 Maret 1946 menteri agama H.M. Rasyidi mengambil alih tugas – tugas keagamaan dari beberapa kementerian, yakni, Pertama dari Kementerian Dalam Negeri, mengambil tugas dan urusan yang berkenaan dengan masalah perkawinan, peadilan agama, kemasjidan dan urusan haji. Kedua, dari Kementerian Kehakiman yaitu tugas dan wewenang yang berkenaan dengan Mahkamah Islam Tinggi (MIT). Ketiga, dari Kementerian P dan K yang berkenaan dengan pengajaran agama di sekolah – sekolah. Terlepas dari kontrofersi pertentangan antar berbagai agama, akomodasi Departemen Agama ini menurut Wachid Hasyim yang di kutip oleh Azumardi Azra merupakan keberhasilan dari strategi umat Islam saat itu. Begitu juga dengan adanya Departemen Agama ini membuktikan adanya jaminan terhadap kehidupan dan eksistensi agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kebijakan yang berkaitan dengan agama diatur dalam beberapa undang – undang dan keputusan Menteri Agama. Namun seiring dengan

---

<sup>2</sup> Syauqul Muhibbin, tentang Kebijakan Politik Dalam Bidang Keagamaan di Kota Blitar Tahun 2006 – 2007. (Skripsi Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

berlakunya otonomi daerah, pemberlakuan syariat Islam (SI) pasca berlakunya Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah terjadi terutama lewat Perda (Peraturan Daerah). Saat ini ada beberapa daerah yang memberlakukan Perda ini, misalnya Bima, Bireun dan Aceh. Fenomena ini terkait dngan partisipasi umat Islam dalakebijakan dalam bidang keagamaan akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Akan tetapi tidak semudah itu, di sisi lain Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, urusan agama diserahkan kepada pemerintah pusat. Undang – Undang ini lah yang menyebabkan munculnya berbagai model pemahaman dalam menerapkan kebijakan keagamaan di daerah – daerah.<sup>3</sup>

Kehidupan beragama di atur dalam UUD 1945 Pasal 29 dan Sila Pertama pada Pancasila. Kehidupan beragama dikembangkan dan di arahkan untuk peningkatan akhlak demi kepentingan bersama untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam.<sup>4</sup>

Visi Indramayu sendiri adalah terwujudnya masyarakat Indramayu yang religius, tangguh dan sejahtera dalam suasana kehidupan yang aman tertib dan damai serta tatanan daerah yang makmur, lestari dan

---

<sup>3</sup> Syauqul Muhibbin, tentang Kebijakan Politik Dalam Bidang Keagamaan di Kota Blitar Tahun 2006 – 2007. (Skripsi Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

<sup>4</sup> Indramayu Dalam Angka 2015 Indramayu In Figures 2015, (Indramayu : BPS Kabupaten Indramayu), hal. 87

mandiri. Sedangkan misinya yaitu Sapta Karya “Mulih Harja”.<sup>5</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kebijakan di Jelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya). Mustopadidjadja (1998:30) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Sedangkan menurut Axnderson (1984:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.<sup>6</sup>

Berikutnya ciri – ciri penting dari pengertian kebijakan. Pertama, kebijakan adalah suatu tindakan pemerintahan yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kedua, kebijakan dibuat melalui tahap – tahap yang sistematis sehingga variabel pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup. Ketiga, kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh (unit) organisasi pelaksana. Dan keempat, kebijakan perlu di evaluasi sehingga diketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah.<sup>7</sup>

Dalam pemberlakuan kebijakan tentu saja merupakan faktor dari integritas pribadi seseorang pemimpin atau pimpinan, pengakuan atas

---

<sup>5</sup> Selayang Pandang Indramayu In Harmony, hal. 5

<sup>6</sup> Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005) hal. 263

<sup>7</sup> Ibid, hal. 266 - 267

kekuasaan yang dimiliki akan melahirkan kewenangan untuk dapat berbuat. Demikian pula dengan kemampuan penciptaan tujuan yang sama dengan cara berpikir yang sama. Setiap kehendak yang dinyatakan pada hakikatnya adalah merupakan hasil dpilihan dari sesuatu atau untuk tidak melakukan sejalan dengan konsep kebijakan yang dikemukakan Dye (Musthopadidjaya, 1986) suatu kebijakan dapat disebut kebijakan jika memiliki empat unsur yaitu, pertama ,adanya pernyataan kehendak, ini berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. Kedua, pernyataan didasarkan pada otoritas. Ini berarti ada kewenangan yang dimiliki atau yang melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau asosiasi, terlepas dari mana kewenangan itu diperoleh, apakah lewat penunjukan dan pengangkatan atau melalui suatu proses demokratisasi. Ketiga adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan pemaksaan kehendak. Keempat, adanya tujuan yang di kehendaki.<sup>8</sup>

Dalam hal ini peran melalui kebijakan – kebijakan yang dilakukan Dr. H. Irianto MS. Syafiuddin dalam bidang keagamaan bertujuan untuk mencapai masyarakat yang religius. Karena agama adalah sebuah keyakinan yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari – hari. Kemudian pola pemahaman dan pengalaman agama ini yang melekat dan

---

<sup>8</sup> Faried Ali, Andi Syammsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal. 8 - 9

menjadi budaya pada suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis dalam proposal skripsi ini mengangkat judul “Peran Dr. H. Irianto MS. Syafiuddin Dalam Bidang Keagamaan di Indramayu Tahun 2000 - 2010”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini dapat terarah, maka penulis membuat batasan-batasan penelitian dengan membuat beberapa rumusan masalah rumusan masalah berikut antara lain :

1. Bagaimana biografi Dr. H. Irianto M.S. Syafiuddin
2. Bagaimana Peran Dr. H. Irianto M.S. Syafiuddin dalam bidang keagamaan di Kabupaten Indramayu tahun 2000 - 2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui biografi Dr. H. Irianto M.S. Syafiuddin
2. Untuk mengetahui Peran Dr. H. Irianto M.S. Syafiuddin dalam bidang keagamaan di Kabupaten Indramayu tahun 2000 – 2010

## **D. Kajian Pustaka**

Untuk penulisan ini, dikumpulkan mengenai sumber – sumber pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan di gunakan sebagai pengetahuan dasar dalam memahami kebijakan politik keagamaan,

---

<sup>9</sup> A Mukti Ali, Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998), hlm. 130

diantara buku – buku yang berhasil di temukan adalah antara lain;

1. Sejarah Indramayu, H. A. Dasuki yang menjelaskan bagaimana sejarah awal pembentukan Indramayu dan tokoh – tokoh pendiri juga perjalanan Indramayu dari masa lampau.
2. Selayang Pandang Indramayu In harmony. Buku ini memberikan kemudahan dalam memahami arah dan kebijakan strategi pembangunan Kabupaten Indramayu dan juga memberikan akses informasi tentang Visi dan Misi bagi Indramayu sendiri pada masa Bupati Dr. H. Irianto MS. Syafiuddin.
3. Indramayu Dalam Angka 2001. Buku yang diterbitkan oleh BPS Indramayu, memberikan kemudahan dalam memahami kondisi Indramayu dalam berbagai bidang dan strategi pembangunan Indramayu.
4. Pengabdian YANCE (Dr. H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin) Mengusung idiologi kesejahteraan “Remaja” Memakmurkan Bumi Wiralodra. Buku ini memberikan informasi tentang tokoh Yance sebagai bapak pembangunan.
5. Religius Government Menakar Pemikiran YANCE Untuk Membentuk Sistem Pemerintahan dengan Landasan Agama. Buku ini memberikan informasi mengenai pemikiran YANCE dalam membentuk sistem pemerintahan yang berlandasan agama
6. Refleksi Filosofi Sapu Lidi dan Korupsi. Buku ini ditulis langsung oleh YANCE, buku ini adalah refleksi hati nurani dari seorang bupati yang berjuang memiliki keyakinan bahwa keberhasilan pembangunan didaerahnya merupakan hasil karya bersama

## E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam metodologi penelitian sejarah, seorang sejarawan dituntut untuk menguasai metode yang digunakan agar mengetahui peristiwa di masa lampau. Untuk itu dilakukanlah penelitian berupa prosedur penyelidikan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sejarah. Penelitian sejarah merupakan penelitian yang tergolong “metode sejarah”, yaitu metode penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah melalui tahapan tertentu. Penerapan metode sejarah memerlukan tahapan-tahapan kerja yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>10</sup>

### 1. Heuristik

Heuristik berasal dari bahasa Yunani *heuriskein* yang artinya “menemukan.” Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang sesuai dengan tema penelitian.<sup>11</sup> Sumber sejarah dibagi menjadi tiga; tertulis, lisan, dan benda.<sup>12</sup> Dari pengumpulan sumber penulis mendapatkan dari BAPUSIPDA, Kantor Kesra Kabupaten Indramayu, Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Buku yang di butuhkan sebagai penelusuran adalah sebagai berikut;

- a. Selayang Pandang Indramayu In harmony
- b. Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan*

---

<sup>10</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 75

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 93

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 95



*Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005)

- c. Faried Ali, Andi Syammsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)
- d. Solemanto, *Pengabdian YANCE (Dr. H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin) Mengusung idiologi kesejahteraan “Remaja” Memakmurkan Bumi Wiralodra* (Bogor: Penerbit Flashbook, 2011)
- e. H. Hidayat Hussein Effendi, MA, *Religius Goverment Menakar Pemikiran YANCE Untuk Membentuk Sistem Pemerintahan dengan Landasan Agama* (Indramayu: YANCE CENTRE Publisher, 2011)
- f. H. Irianto M.S. Syafiuddin, *Refleksi Filosofi Sapu Lidi dan Korupsi* ( Jakarta Selatan: Blantika, 2007)

Arsip atau dokmen;

- a. Bupati Indramayu. Nomor 451.1/1195/Kesra. Perihal Pelaksanaan Kegiatan Membaca Al-Qur’an 15 Menit.
- b. Pemerintah Kabupaten Indramayu Sekretariat Daerah. Nomor 025/376/Kesra. Perihal Juklak Pemakaian Kerja/ Seragam Sekolah Muslimah (Berjilbab).
- c. Bupati Indramayu. Nomor 451.4/1463/Kesra. Perihal Himbauan Bupati.
- d. Bupati Indramayu. Nomor 425.3/1305/Kesra. Perihal Pakaian Seragam Sekolah.

- e. Bupati Indramayu. Nomor 451/103/Kesra. Himbauan Pembentukan dan Pelaksanaan UPZ, Zakat Profesi, Infaq/ Shadaqah.
- f. Bupati Indramayu. Nomor 451.1/367-Kesra. Perihal Intruksi.

### **Sumber Lisan**

- a. Wawancara dengan Bapak Haryo Prayitno, seorang protokoler Yance semasa menjabat sebagai bupati Indramayu pada tanggal 11 Oktober 2022 . wawancara langsung dilakukan di rumah terapi sultan milik beliau. Beliau menjelaskan tokoh seorang Yance yang merupakan tokoh inspiratif dalam membangun sebuah pemerintahan yang selalu mengedepankan atau melandasi agama, beliau menjelaskan beberapa jasa selama Yance menjabat yang merubah keadaan sosial masyarakat Indramayu
- b. Wawancara dengan Daniel Mutaqin Syafiuddin, seorang anak dari Yance sendiri, wawancara langsung dilakukan di kediaman rumah Yance pada peringatan doa bersama untuk Yance, beliau menerangkan sosok ayahnya yang merupakan tokoh yang dapat di tiru untuk anak muda agar memakmurkan bumi wiralodra khususnya.

## 2. Kritik

Kritik merupakan proses pengujian (verifikasi) terhadap keabsahan fakta - fakta atau data- data sejarah yang di temukan di lapangan penyelesaian sumber apakah sumber terjamin keorisnilanya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini di lakukan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan pengujian yang di lakukan untuk memperoleh keabsahan tentang keaslian sumber (otensitas), sedangkan kritik intern menguji ke absahan tentang kesahehan isi sumber (kredibiltas)<sup>14</sup>. Ada dua kritik, yakni kritik internal dan eksternal.

### a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal menyangkut pengujian terhadap keaslian sumber dan wajib dilakukan oleh sejarawan. Kritik eksternal berguna untuk melakukan pengujian terhadap aspek “luar” dari suatu sumber, seperti tentang siapa penulisnya.<sup>15</sup> Sejarawan harus melakukan proses kritik atau seleksi yang ketat guna mendapatkan fakta yang utuh mengenai masa lalu. Untuk itu sejarawan harus lihai dalam melaksanakan kritik, karena bagaimanapun juga, seorang sejarawan, seperti yang dikatakan Paul Veyne, hanya menghadirkan fakta.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) hal. 101

<sup>14</sup> Hasan Usman, *Metode Penelitian Sejarah*, Terjemahan A. Muin Umar et al. (Jakarta: Proyek Pembinaan Prsarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama

<sup>15</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hal. 102

<sup>16</sup> Paul Veyne, *Writing History: Essay on Epistemology*, (Connecticut: Wesleyan University Press, 1984), hal. 7 - 13

## **b. Kritik Internal**

Jika tahapan kritik eksternal menekankan aspek “luar” sebuah sumber, maka tahapan kritik internal akan lebih menyoroiti bagian “dalam”, yaitu isi dari sebuah sumber. Kritik internal adalah bentuk pengujian terhadap masalah kredibilitas.<sup>17</sup> Dalam tahap ini seorang penulis harus memberikan keputusan bahwa apakah “kesaksian itu dapat diandalkan (*reliable*) atau tidak.”<sup>18</sup>

### **Sumber Tulisan**

- 1) Dalam kritik ini penulis melakukan kritik terhadap isi dari buku *Pengabdian YANCE (Dr. H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin) Mengusung idiologi kesejahteraan “Remaja” Memakmurkan Bumi Wiralodra* yang ditulis oleh Solemanto buku ini bisa dijadikan sumber primer atas rekam jejak pengabdian sosok Dr. H. Irianto M.S Syafiuddin yang merupakan bupati yang menjabat di Indramayu selama 2 priode, serta sepak terjangnya yang bisa disebut sebagai tokoh inspiratif dan patut di teladani.
- 2) Dalam kritik internal ini penulis melakukan kritik terhadap isi buku *Religius Government Menakar Pemikiran Yance Untuk Membentuk Sistem Pemerintahan dengan Landasan Agama*, yang ditulis oleh H. Hidayat Hussein Effendi, MA. Buku ini bisa dijadikan sumber primer

---

<sup>17</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI – Press, 2005), hal 112 - 121

<sup>18</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, hal 104

mengenai akar pemikiran Yance yang mengemban amanat sebagai pemimpin daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang dilandasi dengan Agama.

3) Dalam kritik internal ini penulis melakukan kritik terhadap buku Indramayu Dalam Angka 2001. Buku yang diterbitkan oleh BPS Indramayu, memberikan kemudahan dalam memahami kondisi Indramayu dalam berbagai bidang dan strategi pembangunan Indramayu.

4) Dalam kritik Internal ini penulis melakukan kritik terhadap buku Refleksi Filosofi Sapu Lidi dan Korupsi yang ditulis oleh Yance sendiri, buku ini membahas tentang perjalanan kisah Yance selama menjabat sebagai bupati di kabupaten Indramayu, dalam bukunya menceritakan pengalaman – pengalaman sederhana namun patut di teladani pemimpin sekarang yang mengalami degradasi moral.

#### **Sumber Lisan**

Dalam kritik intern ini penulis harus mengadakan kritik terhadap isi dari wawancara yang sudah dilaksanakan. Wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Harto Prayitno dalam wawancara ini beliau menjelaskan sosok seorang yance sebagai tokoh politik yang agamis, menurut beliau selama yance menjadi tokoh politik yaitu bupati di Indramayu selama 2 periode tahun 2000 – 2010 banyak merubah polapikir masyarakat tentang pentingnya sebuah agama, pendidikan agar

masyarakat menjadi lebih maju, karena visi misinya yaitu REMAJA (religius maju mandiri dan sejahtera) beliau menceritakan bagaimana Yance membuat sebuah kebijakan yang berlandaskan agama sesuai dengan yang saya temukan di Kantor Kesra Kabupaten Indramayu diantaranya: Perihal pelaksanaan kegiatan membaca Al-Qur'an 15 Menit, perihal juklak pemakaian kerja/ seragam Sekolah muslimah (berjilbab), perihal wajib madrasah. Hal ini saya jadikan sebagai sumber primer bahwasanya peran tokoh politik sangat berpengaruh dengan kekuasaannya terhadap perubahan zaman. Kemudian wawancara dengan Daniel Mutaqin Syafiuddin seorang anak kandung Yance beliau menceritakan perjuangan seorang ayahnya yang tiada hentinya membangun masyarakat Indramayu agar religius.

### 3. Interpretasi

Tahapan interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta ataupun bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas di masa lampau adalah hanya saksi-saksi sejarah bisu belaka. Secara metodologi interpretasi merupakan “bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses penelitian sejarawan dan penulisan sejarah.”<sup>19</sup> Pada tahapan ini penulis sudah melakukan penafsiran terhadap sumber yang di temukan.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teorinta Kuntowijoyo yakni individu sebagai kekuatan sejarah.<sup>20</sup> sejarah tak hanya ditorehkan

---

<sup>19</sup> A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal 81

<sup>20</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995. Hal 106 -107

oleh tokoh – tokoh nasional. Namun jalannya sejarah juga bisa ditentukan oleh tokoh – tokoh daerah. Yang terakhir inilah yang mendorong sejarawan Sartono Kartodirdjo memprakasai penulisan sejarah dalam perspektif sosial. Di mana, elemen – elemen yang ada dalam masyarakat bisa mendorong lahirnya sejarah baik dalam spektrum lokal, nasional maupun global.<sup>21</sup>

#### 4. Historiografi

Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah di seleksi dalam bentuk tulisan sejarah.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Gottschalk Historiografi adalah sebagai rekontruksi imajinatif tentang masa lampau berdasarkan fakta ( Rekaman atau peninggalan sejarah) yang diperoleh melalui proses verifikasi, analisis dan sintesis secara kritis, sehingga menjadi karya ilmiah yang bersifat deskriptif dan analitis.<sup>23</sup>

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi kedalam

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, kajianpustaka dan langkah-langkah penelitian.

BAB II, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai gambaran umum yaitu kondisi geopolitik dan kondisi keagamaan yang

---

<sup>21</sup> Solemanto, *Pengabdian YANCE (Dr. H. Irianto Mahfudz Sidik Syafiuddin) Mengusung ideologi kesejahteraan "Remaja" Memakmurkan Bumi Wiralodra* (Bogor: Penerbit Flashbook, 2011)

<sup>22</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 147

<sup>23</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI – Press, 2005), hal. 32 - 33

ada di Indramayu.

BAB III, dalam bab ini menguraikan pembahasan mengenai biografi, peran dan kebijakan DR. H, Irianto MS. Syafiuddin dalam bidang keagamaan di Indramayu tahun 2000 - 2010

BAB IV, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

